

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, 1976
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011
- Al.Wisnubroto dan G.Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Amin Rahman, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Andi Sofyan dan Abdul Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Arief Sidharta, *Hukum dan Logika*, Alumni, Bandung, 2000
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.1, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Burhan Bungin, *Analisis Data dan Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Model Aplikasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- C. S. T. Kansil, dkk., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- C.Djismin Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Jakarta, 2013
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum (Mencari, Menemukan dan Memahami Hukum)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2020
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, PT Gelora Aksara Pratama, 2012
- HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Press, Malang, 2008

- H.S. Brahmana, *Teori Hukum dan Pembuktian*, Pengadilan Negeri Lhoksukon, 2014
- Halim HS & Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Harli Siregar dan Sakafa Guraba, *Admisinilitas Bukti Elektronik dalam Persidangan*, PT Rajagrafindo, Depok, 2023
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- J. Cosic dan M. Baca, "Do We Have Full Control Over Integrity in Digit dence Life Cycle?", dalam *Proceeding ITI 2010 32nd Int. Conf. on Information technology Interfaces*, 2010
- Johhny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008
- Joko Siswanto, *Metafisika Sistematis*, Taman Pustaka Kristen, Yogyakarta, 2004.
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tata Nusa, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT.Alumni, Bandung.
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner Memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII-Press, Yogyakarta, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*, Sinar grafika, Jakarta, 2009
- Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

Martiman Projohamidjojo, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek* cetakan I, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.6, Kencana, Jakarta, 2010

Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Dikutip oleh Sahuri Lesmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003.

Reda Manthovani, *Penyadapan Vs Privasi*, Bhuanna Ilmu Populer, Jakarta, 2015

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2003.

Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta, 2010.

Taufik Yahya et. all, *Buku Pedoman Penulisan Tesis Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi*, 2022.

Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Research (Pengantar Metodologi Ilmiah)* Tarsito, Bandung, 1982.

Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, Bulak Sumur, Jakarta, 1967.

Jurnal

Ade Ardes Wijaya, *Akun Media Sosial Sebagai Barang Bukti Dalam Tindak Pidana, Bagaimana Penegakan Hukumnya*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.11, 2022,

Anas Aditya Wijanarko, Ridwan, Aliyth Prakarsa, “Peran Digital Forensik dalam Pembuktian Tempus Delicti Sebagai Upaya Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembuat Video Pornografi”, *PAMPAS: Journal Of*

Criminal, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 79. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14771>.

D. Sudyana “Instrumen Evaluasi Framework Investigasi Forensika Digital menggunakan SNI 27037 : 2014”, *Jiska*, Vol. 1 No.2.

Daniel Widya Kurniawan dan Sri Wahyuningsih Yulianti, “Kekuatan Pembuktian Cetakan Media Social Dalam Menyebarkan Konten Pornografi Sebagai Tindak Pidana Di Bidang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Verstek* Vol.8 No.1 (2020).

Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Hukum Peraturan* Vol. III, Agustus 2020

Dewi Asimah, “Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik”, *Jurnal Hukum Peratun* Vol. 3 No.2, 2020.

Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Sekelumit Mengenai Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Jakarta, 2006.

Farol Medelinde, dkk, “Forensik Digital dalam Pembuktian Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial”, *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol.3 No.3.

I Dewa Made Suartha “Pergeseran Asas Legalitas Formal dan material dalam pembaharuan hukum pidana nasional”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, *Yustisia*, Vol.4, Nomor 1, Januari-April 2015.

I Kadek Arya Sumayadiyasa “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Cyber Crime* dengan Konten Pornografi”, *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 2 No.2 (2021).

Insan Pribadi, “Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Lex Renaissance* No.1 Vol.3, 2018.

M. Yuzron. “Tinjauan Tentang Dasar Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. XIX, No. 19. 2010.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* Volume 01 Nomor 01, Juli 2019.

Meli Indah Sari dan Hafrida, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Pengganti Pidana Denda dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”.

PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 1, 2020,
<https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8260>.

Triyanti “Kekuatan Pembuktian Dokumen Elektronik sebagai Pengganti Minuta Akta Notaris”, *Jurnal Repertorium* Vol.2 No.2 (2015).

Yuni Fitriani, Roida Pakpahan, Analisis Penyalahgunaan Media Sosial untuk Penyebaran Cyber Crime di Dunia Maya atau Cyber Space, *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, Vol.20 No.1 Maret 2020.

B. Internet

<https://nasional.sindonews.com/berita/1417874/13/kasus-baiq-nuril-bukti-rentannya-perempuan-di-ruang-siber>.diakses 22 Juni 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/802445/mk-penyadapan-atas-setya-pada-kasus-papa-minta-saham-ilegal> Yudono Yanuar Akhmadim, MK: Penyadapan atas Setya pada Kasus Papa Minta Saham Ilegal, tempo.co, ,diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

<https://peluangusaha.kontan.co.id/news/profesi-menggiurkan-di-era-digital>, diakses 13 Maret 2024.

<http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Teknik-Pembuktian-di-Persidangan.pdf>, diakses 22 Maret 2024.

<https://news.okezone.com/read/2019/07/05/337/2075133/putusan-kasus-baiq-nuril-dinilaiberdasarkan-bukti-yang-tidak-sah> S. Hutagaol, Putusan Kasus Baiq Nuril Dinilai Berdasarkan Bukti yang Tidak Sah”, diakses 13 April 2024

<https://media.neliti.com/media/publications/282073-data-elektronik-sebagai-alat-bukti-yang-4bc3d6af.pdf>, diakses 18 Desember 2023.

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12035/05.2%20bab%20.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses 12 Februari 2024.

<http://www.calonsh.com/2016/10/16/konsepsi-saksi-dalam-perkara-pidana-pasca-putusan-mk-nomor-65puu-viii2010>, diakses 28 Februari 2024

<http://www.hukumonline.com/saksi-memberatkan-meringankan-mahkota-dan-alibi>, diakses agustus 2023.

<http://www.radarbanjarmasinnews.com/2015/08/16/alat-bukti-elektronik-dalam-pidana>, diakses Desember 2023.

<https://www.lawinsider.com/dictionary/social-media-account>, Law Insider, “Definisi Akun Media Sosial”, diakses 06 Juni 2024.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl546>, Hukum Online, “Syarat dan ketentuan hukum alat bukti elektronik, diakses pada tanggal 21 Februari 2024

<https://www.r-lawyerid/adagium-hukum-yang-wajib-dipahami-arti-dan-maknanya/>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2023.

<https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html>, diakses pada tanggal 06 Juni 2024.

<https://nasional.tempo.co/read/802445/mk-penyadapan-atas-setya-pada-kasus-papa-minta-saham-ilegal>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674.

Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150.

Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284.

Undang-Undang No.25 tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108.

Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

Undang-Undang No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016

E. Putusan

Putusan Pengadilan Muara Teweh No.121/Pid.B/2020/PN Mtw.

Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng.

Putusan PK Nomor 225 PK/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 822/k/Pid.Sus/2010.

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 393/PID/2016/PT.DKI.